



Judul : Menanggapi Bivitri
Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

KOMPAS, SELASA, 11 JANUARI 2022

Opini | 7



SURAT KEPADA REDAKSI

Rubrik ini menerima surat Anda mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman Opini maupun pemberitaan Kompas, serta masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan konsumen yang tidak terselesaikan dalam prosedur formal. Maksimal 300 kata atau 2.300 karakter. Surat pembaca dikirim kepada opini@kompas.id atau ke Redaksi Kompas, Jl Palmerah Selatan 21, Jakarta 10270 dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau pindaian identitas diri.

Menanggapi Bivitri

Menarik menanggapi tulisan Ibu Bivitri Susanti (*Kompas*, 6/1/2022) berjudul "Legislasi untuk Siapa". Kita harus sadar betul bahwa proses legislasi kita sedang tidak baik-baik saja. Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 sebanyak 221 RUU, baru 10 rampung.

Tidak sedikit pula legislasi yang disahkan justru berseberangan dengan kehendak rakyat. Contohnya UU KPK dan Omnibus Law. Legislasi yang mendesak malah mandek prosesnya. Bahkan, RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) masih diwarnai perdebatan alot antara DPR dan pemerintah terkait lembaga otoritas data, padahal kebobolan data pribadi terus terjadi.

Demikian pula RUU Perampasan Aset selalu masuk dua Prolegnas jangka menengah terakhir, tetapi selalu terpental di Prolegnas prioritas tahunan. RUU Pemilu, khususnya Pasal 222 UU No 7/2017 terkait dengan *presidential threshold* yang ditentang berbagai kalangan, justru ditarik dari Prolegnas 2021.

Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi serius terhadap pembentukan undang-undang. Apalagi waktu DPR dan presiden tinggal dua tahun lagi. Sementara di sisi lain, mendekati tahun politik 2024, partai-partai politik akan disibukkan pada agenda pemenangan pemilu.

Bivitri menyoal ketersambungan lembaga perwakilan dengan masyarakat. Pernyataan ini diafirmasi oleh survei tingkat kepercayaan terhadap institusi negara yang dirilis Indikator Politik, Desember 2021. Hasilnya, DPR dan partai politik menempati posisi paling buncit.

Menarik ditunggu, dari 40 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2022, berapa banyak RUU yang dapat disahkan? Semoga DPR mencapai target dan sesuai aspirasi rakyat.

MUHAMMAD NAUFAL

Jalan Serut, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur